

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)**

Studi Kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Rezki Natalia Pagappong
NIM : 082114005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2012

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)**

Studi Kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Rezki Natalia Pagappong
NIM : 082114005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2012

Skripsi

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
Studi Kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan**



Oleh:

Rezki Natalia Pagappong

NIM : 082114005

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firma'.

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal : 9 Agustus 2012

Skripsi

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
Studi Kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Rezki Natalia Pagappong

NIM: 082114005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2012
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Firma Sulistiyowati S.E., M.Si., QIA	
Anggota	Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A.	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA	

Yogyakarta, 31 Agustus 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Dr. H. Herry Maridjo, M.Si.

*Hanya Sederhana Inginku,
membuatmu :
Bangga dan Bahagia Memiliki Aku*


Dengan rendah hati karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- ♥ *Tuhan Yesus Kristus , yang selalu menjaga, membimbing dan senantiasa memberikan berkat dan kasih anugerah yang selalu menuntun segala langkah dan usaha dalam hidupku.*
- ♥ *Papaku Markus Pagappong dan Mamaku Yuli Mika yang telah mendidik, membesarkan, dan memberikan banyak pelajaran tentang arti kehidupan kepadaku untuk selalu menjadikanku lebih baik.*
- ♥ *Adikku Donny A. Pagappong , terus belajar dan capailah cita-citamu*
- ♥ *Agus N. Marpaung , yang telah mewarnai hari-hariku. Terima kasih karena telah membuatku berarti sekecil apapun itu*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus”.

[Filipi 4:6-7]



God knows what you need
and when you need it
His timing is perfectly matched to
and for your destiny

Do your best and be the best of whatever you are



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 Agustus 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan karya saya sendiri . Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2012
Yang membuat pernyataan,

(Rezki Natalia Pagappong)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Rezki Natalia Pagappong

Nomor Mahasiswa : 082114005

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

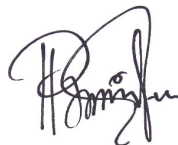
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 31 Agustus 2012

Yang menyatakan



Rezki Natalia Pagappong

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Bapa Yang Mahakasih, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud seperti adanya sekarang ini. Oleh karena itu, dari hati yang paling tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis diucapkan kepada:

- a. Dr. Ir. P. Wiryono Priyatamtama, S.J selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- b. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- c. Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- d. Firma Sulistiyowati S.E., M.Si., QIA selaku pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Semua dosen Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- f. Romo Priyono Marwan dan Romo Mutiara Andalas, terima kasih telah menjadi panutan sekaligus sahabat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- g. Kedua Orang tuaku dan adikku yang selalu memberikan hal terbaik dan doa dalam setiap langkah hidupku.
- h. Untuk keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doanya.
- i. Agus N. Marpaung atas pengertian, dukungan dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- j. Sahabat - sahabatku Gloria, Ita, Lola, Titin, Vera, Vincen & Arya. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini.
- k. Teman-teman kelas MPT, Utik, Angel, Kathy, Tiwi, Dita, Novia, Donna, Arsen, Andre dan Robert.
- l. Teman-teman Akuntansi 2008 Fakultas Ekonomi USD.
- m. Teman-teman kos kenari 5, mba nisa, mba dian, mba mega, intan, ana, rosi, mba lisa. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini.
- n. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 14 Juli 2012



Rezki Natalia Pagappong

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Teori Pendukung	8
1. Konsep Anggaran Sektor Publik	8
2. Keuangan Daerah	12
3. Pengawasan Keuangan Daerah	13
4. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	14
5. Akuntabilitas	16
6. Partisipasi Masyarakat	17
7. Transparansi Kebijakan Publik	18
B. Hasil Penelitian Terdahulu	20
C. Perumusan Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Subyek dan Obyek Penelitian	28
D. Teknik Pengambilan Sampel	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Variabel Penelitian	31
G. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	36
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN	46
A. Gambaran Umum Kota Balikpapan	46
B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan	50

BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	60
A.	Deskripsi Data Responden.....	60
B.	Analisis Data.....	62
1.	Pengujian Instrumen	62
2.	Pengujian Asumsi Klasik	65
3.	Pengujian Hipotesis	69
C.	Hasil Penelitian dan Interpretasi	79
1.	Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah	80
2.	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah	81
3.	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah	82
4.	Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah.....	84
BAB VI	PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Keterbatasan Penelitian	86
C.	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2 Karakteristik Responden	61
Tabel 3. Hasil Uji Validitas.	63
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas.....	65
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Pertama.....	69
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Pertama	70
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Kedua	71
Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua	73
Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Ketiga.....	74
Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga.....	75
Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Keempat.....	77
Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat.....	78

ABSTRAK

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
Studi Kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan**

Rezki Natalia Pagappong
NIM: 082114005
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan dengan masa jabatan tahun 2009-2014. Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda dengan pendekatan nilai selisih mutlak untuk melihat pengaruh variabel moderasi setelah dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dan variabel moderasi yaitu akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

ABSTRACT

**THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, PUBLIC PARTICIPATION AND
TRANSPARENCY OF PUBLIC ON POLICY TO THE RELATION
BETWEEN KNOWLEDGE OF THE BOARD ON BUDGET AND
REGIONAL (APBD) FINANCIAL SUPERVISION
A Case Study to the House of Representatives of Balikpapan Municipality**

Rezki Natalia Pagappong
NIM: 082114005
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2012

The aim of this study was to examine the effect of board's knowledge about the budget on the supervisory of regional finance (APBD). This study also aimed to test whether accountability, public participation and transparency in public policy as moderating variables may affect the relationship between board's knowledge about budget and regional (APBD) financial supervision.

This study was a case study in the regional house of representative (DPRD) of Balikpapan municipality. In this study, the type of data used were primary data collected using the research instrument of questionnaire given to respondents. Respondents in this study were all members of Balikpapan municipality for term years of 2009-2014. The test for the research instruments used validity and reliability tests. The hypothesis testing used simple regression and multiple regression with absolute difference value approach to see the effect of moderating variables after the classical assumption test.

The results of this study showed that knowledge of the board about budget affect regional financial supervision and moderating variables namely accountability, public participation and transparency of public policy affect the relationship between the knowledge of the board on the budget and regional (APBD) financial supervision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan di bidang pemerintahan yang terjadi di Indonesia banyak membawa dampak yang dapat mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang diambil, baik oleh pemerintah maupun Undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD). Salah satu perubahan yang terjadi menghasilkan sebuah kebijakan yang dikeluarkan melalui Sidang Istimewa oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan Perundang-Undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tersebut merupakan landasan hukum dikerluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang sekarang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang sekarang direvisi menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Terbitnya Undang-Undang tersebut secara paradigmatik sangat berbeda dengan Undang-Undang No.

5 tahun 1974 dan menampilkan perbedaan-perbedaan mendasar. Perbedaan yang sangat mendasar selain fungsi, peran, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat, maupun sistem dan struktur pemerintahan daerah, juga menyangkut kewenangan perangkat Pemerintah Daerah serta menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah maupun pembiayaannya.

Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1999 dijelaskan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Kedudukan diantara kedua lembaga tersebut bersifat sejajar dan menjadi mitra. Sementara itu yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah hanya kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 41, Lembaga Legislatif mempunyai fungsi yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Fungsi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan, karena pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara berhati-hati. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan hak DPRD, diharapkan DPRD akan lebih aktif di

dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat melahirkan berbagai bentuk kebijakan publik yang akan berlaku di daerah.

Dengan ditetapkannya otonomi daerah, diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) di kalangan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Oleh karena itu, peran anggota dewan sebagai pengontrol kebijaksanaan pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, lembaga legislatif diharapkan memiliki sumber daya manusia yang memadai agar dapat memahami tentang anggaran untuk tercapainya keefektifan dalam fungsi pengawasan.

Partisipasi masyarakat juga telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan di dalam penyusunan APBD, karena APBD adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam pembangunan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan harus diterapkan dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dengan didukung oleh transparansi dari pihak pemerintah yang terbuka

dan jujur kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah saat ini, kinerja dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat karena telah diberikannya kepercayaan kepada para anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan dewan serta faktor-faktor lain seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
4. Apakah tranparansi publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
4. Mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para anggota DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan

Sebagai bahan evaluasi kinerja yang dapat mengukur sampai sejauh mana tingkat pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan guna mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai salah satu cara untuk pencapaian otonomi daerah yang optimal dalam hal perkembangan pengawasan keuangan daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang akuntansi sektor publik yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam pengembangan penelitian berikutnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima selama berada di bangku kuliah dan menambah wawasan dengan terjun langsung ke lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik

pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, pengujian validitas dan reliabilitas, variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kota Balikpapan yang meliputi sejarah Kota Balikpapan, Visi dan Misi, Pembagian Wilayah dan Pemerintahan, Kondisi dan Potensi wilayah, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD, dan Alat Kelengkapan DPRD.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, dengan menggunakan metode dan teknik sebagaimana diuraikan dalam metode penelitian.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pendukung

1. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo 2002) . Anggaran merupakan bagian yang sangat penting karena akan memberikan gambaran dalam periode tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang akan diterima serta jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk belanja dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran memberikan estimasi bagi pengelola daerah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pada masa yang akan datang, karena setiap anggaran yang disusun memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu. Anggaran pemerintahan merupakan biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana. Jadi, anggaran merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun dalam satu periode tertentu yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan dari pemerintah.

(Mardiasmo, 2002) Proses penyusunan anggaran terdapat empat faktor penting yang menjadi landasan utama yaitu: (1) tujuan dan target yang hendak dicapai, (2) ketersediaan sumber daya, (3) waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, (4) faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran. Penyusunan anggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit

dalam pembuatannya karena mengandung aspek politis sehingga dalam penyusunannya terdapat kepentingan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dapat dikategorikan sebagai proses politik antara kedua belah pihak dan bukan hanya proses ekonomi. Berbeda sekali dalam penyusunan anggaran dalam perusahaan swasta dimana dalam penyusunannya tidak terdapat kaitan politis. Bagi perusahaan swasta penyusunan anggaran sangatlah tertutup bagi publik dan merupakan rahasia, sedangkan dalam sektor publik transparansi dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan untuk menginformasikan kepada publik untuk dikritik, dan memberikan saran.

Tahap penyusunan anggaran sektor publik dimulai setelah rancangan perumusan strategi kebijakan pemerintah telah diselesaikan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk dapat mengetahui perkiraan jumlah dana yang akan dialokasikan pada rancangan strategi yang telah dibuat. Anggaran merupakan tahap implementasi hasil rancangan strategik yang telah ditetapkan. Proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang sangat menentukan karena anggaran yang disusun secara tidak efektif dan tidak berorientasi pada hasil dapat menggagalkan rancangan strategi yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan anggaran sektor publik wajib diawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaannya serta pelaporannya. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai suatu rencana yang keuangan yang memuat informasi antara lain: (1) berapa banyak dana yang diperlukan yang

dikeluarkan untuk tercapainya rencana-rencana yang disusun (pengeluaran/belanja) serta (2) berapa banyak dan bagaimana caranya untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk mendanai rencana yang disusun (pendapatan).

a. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, (8) alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2002)

Menurut Darise (2008) fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. Anggaran memberikan landasan penilaian kinerja pemerintah
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Menurut Mardiasmo (2002) ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor "*uncertainty*" (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

2) Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*" namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislaiif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengesahan anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

2. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak”

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengertian APBD dalam konteks Undang-undang Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Peran Pemda pada saat penyusunan APBD adalah menyusun rancangan APBD yang kemudian diusulkan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”. Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah pengawasan terhadap keuangan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan keuangan daerah dalam hal ini adalah pengawasan terhadap eksekutif daerah yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, bukan pemeriksaan (Mardiasmo, 2002). Menurut Alamsyah (1997) dalam Roseptalia (2006) Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan

sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan selaku perwakilan masyarakat di parlemen, kapasitas dan kemampuan anggota dewan sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Kebijakan yang dihasilkan oleh anggota dewan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dasar yang dimiliki dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan.

Yudono dalam Coryanata (2007) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya. Tentunya pengetahuan yang dapat menunjang kerja anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah yaitu pengetahuan dalam bidang keuangan dan anggaran.

Dengan dasar pengetahuan tentang anggaran dan keuangan yang dimiliki oleh anggota dewan, anggota dewan dapat mengawasi kinerja pemerintah untuk mengontrol kebijakan dalam hal ini keuangan daerah (APBD) untuk dapat mencegah kebocoran aliran dana yang diselewengkan, pengambilan kebijakan keuangan yang merugikan, serta kemungkinan terjadinya terjadi pemborosan dana. Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebagai perwujudan dari amanah rakyat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan

DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanannya kepada masyarakatnya.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP, 2005).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Renyowijoyo 2008: 21).

Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong aparat untuk bekerja keras (Handayani, 2009)

Pemerintahan yang *accountable* menurut Sulistoni (2003) dalam Handayani (2009) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Pelaku kebijakan publik harus bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara. Oleh karena itulah akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan baik (Good Governance).

6. Partisipasi Masyarakat

Menurut Krina (2003) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Menurut Mardismo (2009) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Zainuddin *et al.*, 2002 dalam Roseptalia 2006). Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Coryanata, 2007).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, prinsip penyusunan anggaran pada dasarnya harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

Menurut Krina (2003) tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk antara lain melalui wakil-wakil rakyat yang ada dewan (DPRD). Melalui wakil-wakil rakyat aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah daerah.

7. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Menurut Mardiasmo (2002), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN maupun pemerintah daerah yang merancang APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab yang dilakukan yaitu dengan menyediakan informasi keuangan daerah secara transparan kepada publik atau masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah serta implementasi kebijakan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Secara ringkas, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Sopannah dan Wahyudi (2003)	Pengawasan Keuangan Daerah	Akuntabilitas publik, transparansi, partisipasi masyarakat, pengetahuan anggaran dan pengawasan keuangan	Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan sedangkan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan
Rima Roseptalia (2006)	Pengawasan Keuangan Daerah	Pengetahuan dewan, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengawasan keuangan daerah	Pengetahuan anggota dewan tentang Anggaran memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah.
Isma Coryanata (2007)	Pengawasan Keuangan Daerah	Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan dewan, pengawasan keuangan	Pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. akuntabilitas, partisipasi masyarakat, ransparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama Peneliti	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Werimon, Ghozali, Nazir (2005)	Pengawasan Keuangan Daerah	Partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan dewan, pengawasan keuangan	Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
Pramita dan Indriyani (2010)	Pengawasan Keuangan Daerah	pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).	Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

C. Perumusan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960 dalam Werimon 2005).

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (Mardiasmo, 2002)

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001, Sutamoto, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

Yudono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan memiliki pengetahuan tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan Daerah (APBD).

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi ini dimana anggota dewan berpengaruh dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Anggota dewan sebagai pihak legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman dan prosedur akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpanan

kewenangan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan (Pramita dan Andriyani, 2010).

Nanda (2006) dalam Handayani (2009) menyatakan akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996).

Achmadi (2002) dalam Werimon (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi, semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah. Pengawasan dalam hal ini pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Selain itu juga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran dapat menjadi media pertukaran informasi yang efektif. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi

peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (Mardiasmo, 2002). Dengan demikian, keterlibatan atau partisipasi masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

4. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam siklus anggaran, transparansi terhadap anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran.

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

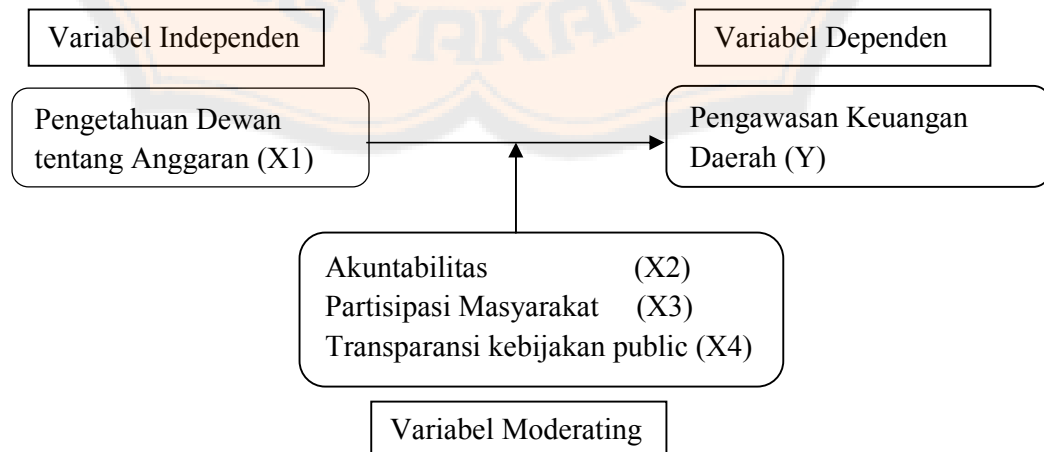
Asumsinya semakin transparan kebijakan publik yang dilakukan dalam hal ini mengenai APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan telaah literatur diatas maka model penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan Keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan ditetapkannya otonomi daerah, diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang otonomi daerah adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD (Mardiasmo, 2002).

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) di kalangan pemerintah. Menurut Mahsun dkk (2007), terdapat tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk itu, penelitian ini ingin menguji apakah dengan memiliki pengetahuan tentang anggaran, anggota dewan dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Serta dengan adanya ketiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat atau meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan untuk tercapainya keberhasilan dalam otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu obyek tertentu dengan mengambil data tertentu pada waktu tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek yang diteliti dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan yaitu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2012.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah tempat dimana variabel penelitian melekat sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, obyek penelitiannya adalah seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan yang berjumlah 45 orang, karena di dalam Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 pasal 46 ayat 1 Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan Penganggaran. Alasan dipilihnya sampel tersebut karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan dan pengawasan terhadap anggaran.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara non probabilitas atau pemilihan nonrandom yaitu *convenience sampling*. *Convenience sampling* (pengambilan sampel secara nyaman) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih bebas sekehendak periset (Jogiyanto, 2004: 79).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan cara survey, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuesioner ini

dilakukan dengan cara mendatangi dan membagikan kuesioner secara langsung ke instansi terkait. Kuesioner ini didistribusikan secara langsung kepada responden yaitu anggota dewan DPRD Kota Balikpapan. Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Sopanah (2003) dan Isma Coryanata (2007).

Setiap kuesioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat dalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan usia. Bagian kedua adalah pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah.

Data-data penelitian ini harus diuji, oleh sebab itu jawaban deskriptif yang didapat oleh responden perlu diverifikasikan terlebih dahulu dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada. Skala Likert ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah. Interval yang digunakan dalam Skala Likert dalam penelitian ini adalah :

1. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1
2. Jawaban tidak setuju diberi skor 2

3. Jawaban tidak tahu diberi skor 3
4. Jawaban setuju diberi skor 4
5. Jawaban sangat setuju diberi skor 5.

F. Variabel Penelitian

Variabel yang ada dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, tiga variabel moderasi yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik serta satu variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006: 163).

1. Pengetahuan Anggaran

Pengetahuan anggaran adalah kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan yang dijadikan sebagai dasar untuk dapat mendeteksi pemborosan atau kegagalan dari anggaran dalam pelaksanaannya.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan anggaran yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai penyusunan APBD
- b. Pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD
- c. Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan anggaran

d. Pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

2. Akuntabilitas

Setiap instansi pemerintah dibentuk dengan mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugasnya. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat atau kewenangannya kepada masyarakat/ publik melalui lembaga perwakilan. Instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah (Utomo, 2011). Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel untuk mengukur akuntabilitas yaitu:

a. Renstrada dan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD

- b. Akuntabilitas merupakan pelaporan pertanggungjawaban masalah keuangan, hasil, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan disajikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat.
- c. Anggota dewan perlu mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP yang disusun pemerintah daerah.
- d. Indikator kinerja digunakan untuk mengevaluasi APBD
- e. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD diawasi secara kontinue
- f. Penyajian APBD harus menyertakan informasi masa lalu (sebelumnya)
- g. Dalam mengevaluasi APBD membandingkan anggaran dengan realisasinya.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan beserta pihak eksekutif mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta penentuan strategi arah dari kebijakan yang akan dijalankan.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat
- b. Prioritas dan rencana APBD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat

- c. Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran
- d. Partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD
- e. Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, selalu melibatkan masyarakat.
- f. Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD
- g. Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD
- h. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD
- i. Dewan dengan masyarakat terjadi komunikasi yang sinergis

4. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disunnya.
- b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses atau diperoleh masyarakat.

- c. Pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
 - d. Usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik.
 - e. Kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran.
 - f. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik dalam meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.
 - g. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran
5. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Pengawasan yang dilakukan ini untuk mengawasi kegiatan pihak eksekutif selaku pelaksana dari perencanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pemborosan anggaran.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik ini adalah sebagai berikut :

- a. Keterlibatan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- b. Analisis politik dilakukan dalam proses penyusunan APBD.
- c. Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD.
- d. Pengesahan APBD telah memenuhi asas transparansi.

- e. Anggota dewan memiliki kemampuan dalam menjelaskan APBD yang telah disahkan.
- f. Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh eksekutif.
- g. Evaluasi yang dilakukan mencakup alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi Anggaran.
- h. Anggota dewan meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.
- i. Anggota Dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD.
- j. Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD, mungkin hanya karena ketidakcermatan dalam menghitung nota anggaran.
- k. Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD.
- l. Saya aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Walikota/Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

G. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pengujian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuisisioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006).

Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom $(df) = n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Sebelum digunakan dalam penelitian untuk mengambil data, terlebih dahulu kuesioner akan diuji reliabilitasnya. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan *One Shot* atau pengukuran sekali saja, disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar pertanyaan. Untuk mengukur reliabilitas dilakukan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 (Nunally, 1967 dalam Ghozali, 2006: 42).

H. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut dikenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan asumsi yang mendasari suatu analisis regresi. Uji asumsi klasik meliputi :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2006: 108). Uji t dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian normalitas data dilakukan dengan analisis statistik

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada *alpha* sebesar 5 %. Jika nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti data normal.

b) Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Suatu model dikatakan bebas multikolonieritas jika nilai Tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 .

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan cara mengabsolutkan nilai residual (pengganggu) yang akan menghasilkan sebuah nilai dan meregresikan nilai tersebut sebagai variabel dependen. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat tingkat signifikansinya, apabila tingkat signifikansi berada di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

2. Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi dengan pengujian R square (R^2) untuk melihat persentase pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian terhadap variabel dependen dan Uji t yang digunakan untuk menguji signifikansi secara

parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi.

a. Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{PKD} = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + e$$

Dimana :

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

PDTA = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

e = *error*

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi dengan pendekatan Uji Nilai Selisih Mutlak untuk menguji pengaruh moderasi (Fruco dan Shearon, 1991 dalam Ghozali, 2006). Model analisis untuk hipotesis kedua sebagai berikut:

$$\text{PKD} = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_2 \text{AKT} + \beta_3 [\text{PDTA} - \text{AKT}] + e$$

Dimana :

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

PDTA = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

AKT = Akuntabilitas

PDTA - AKT = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara PDTA dan AKT

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = *error*

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi dengan pendekatan Uji Nilai Selisih Mutlak untuk menguji pengaruh moderasi (Frucot dan Shearon, 1991 dalam Ghozali, 2006). Model analisis untuk hipotesis ketiga sebagai berikut:

$$\text{PKD} = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_4 \text{PM} + \beta_5 [\text{PDTA} - \text{PM}] + e$$

Dimana :

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

PDTA = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

PM = Partisipasi masyarakat

PDTA - PM = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara PDTA dan PM

$\beta_1 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi

e = *error*

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi dengan model Uji Nilai Selisih Mutlak untuk menguji pengaruh moderasi (Frucot dan Shearon, 1991 dalam Ghozali, 2006). Model analisis untuk hipotesis kedua sebagai berikut:

$$PKD = \alpha + \beta_1 PDTA + \beta_6 TP + \beta_7 [PDTA - TKP] + e$$

Dimana :

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

PDTA = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

TP = Transparansi Kebijakan Publik

PDTA - TP = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara PDTA dan TKP

$\beta_1 \beta_6 \beta_7$ = Koefisien Regresi

e = *error*

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menguji kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen, salah satu ukuran yang bisa digunakan yaitu Koefisien Determinasi.

Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Akan tetapi banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik, karena nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol atau:

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau:

$$H_a: b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tahap-tahap untuk melakukan uji t adalah:

1) Merumuskan hipotesis

$H_{01}: \beta_1=0$, pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

$H_{02}: \beta_3=0$, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

$H_{a2}: \beta_3 \neq 0$, akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

$H_{03}: \beta_5=0$, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

$H_{a3}: \beta_5 \neq 0$, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

$H_{04}: \beta_7=0$, transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

H_{a4} : $\beta_7 \neq 0$, transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

2) Menentukan *level of significance* (α)

Tingkat signifikansi α 5%, derajat kebebasan $df = n - (k+1)$

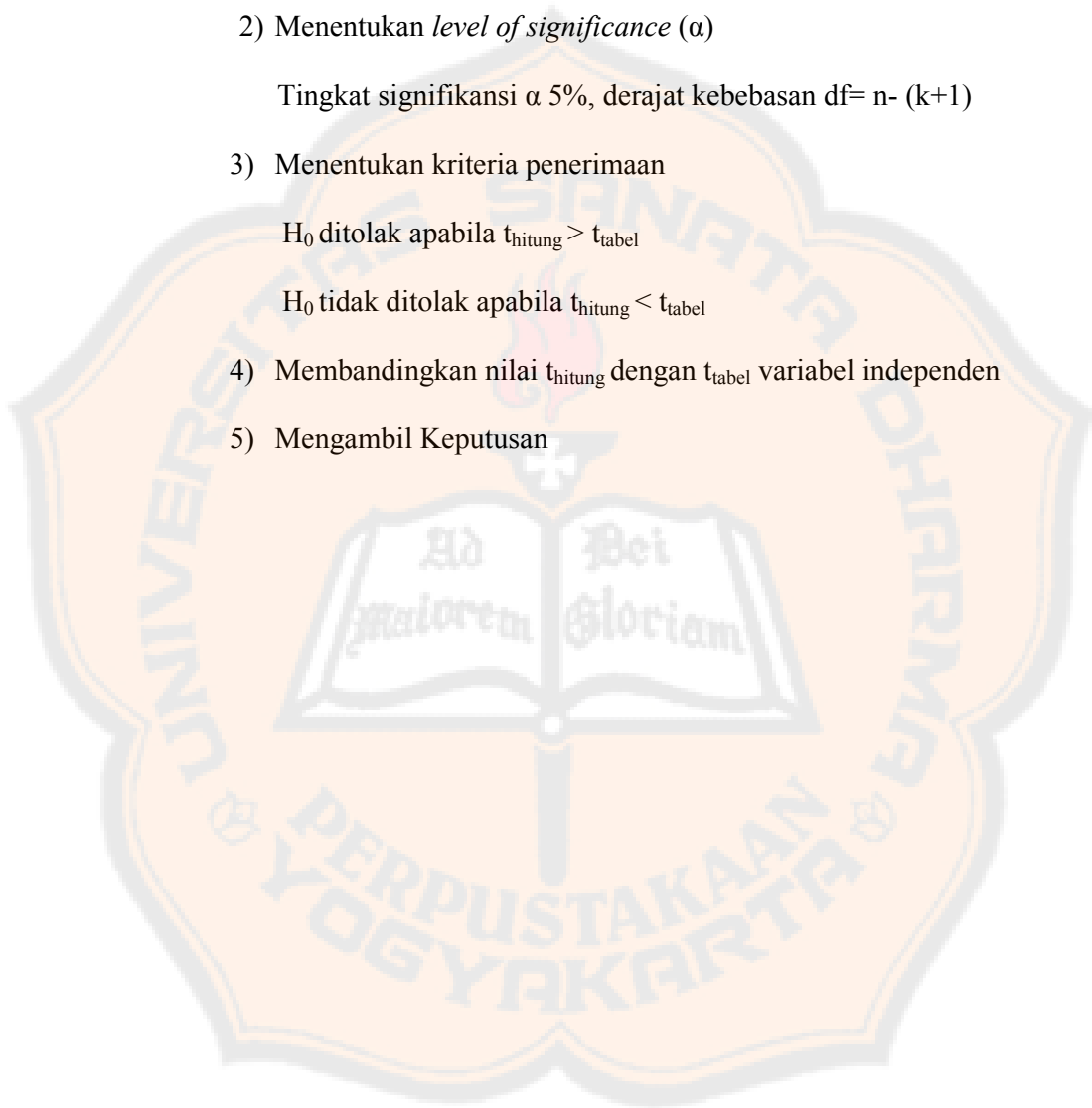
3) Menentukan kriteria penerimaan

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 tidak ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

4) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel independen

5) Mengambil Keputusan



BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA BALIKPAPAN

A. Gambaran Umum Kota Balikpapan

1. Sejarah Kota Balikpapan

Kota Balikpapan berawal sejak ditemukannya sumur minyak oleh Matilda pada tanggal 10 Februari 1897. Sejak saat itulah Kota Balikpapan diminati oleh masyarakat luar karena terkenal sebagai kota minyak. Berbagai suku di Indonesia khususnya Kalimantan sendiri, Sulawesi dan Jawa datang untuk mencari nafkah di kota Balikpapan.

Perkembangan Kota Balikpapan semakin pesat, masyarakat Kota Balikpapan secara langsung terjadi akulturasi berbagai budaya, berbagai suku di Indonesia, ini bisa tercermin dari bahasa pengantar yang digunakan warga Balikpapan adalah yaitu bahasa Indonesia baik sekolah, rumah, tempat kerja dan lain-lain.

Pada kurun waktu yang bersamaan keragaman etnis yang datang diikuti pula dengan berbagai adat istiadat dan agama. Adat istiadat dari berbagai etnis sangat terbina dengan baik, demikian pula penganut agama yang dipeluknya. Hal ini didukung oleh adanya faktor akulturasi budaya, sehingga hubungan masyarakat terjalin harmonis secara turun temurun. Yang menjadi khas Kota Balikpapan adalah tidak terdapat dominasi salah

satu suku, baik dari suku asli Kalimantan maupun suku pendatang, sehingga perekat bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia.

Sebagai wujud implementasi dalam rangka memelihara, menjaga dan meningkatkan integritas, kondusif Kota Balikpapan, sesuai motto Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela.

Balikpapan sebagai kota yang strategis dan kondusif, sangat didukung oleh masyarakat, terutama dalam keramahan dan kebersamaan warga kota dalam keragaman suku/etnis, budaya, nilai kekerabatan antar suku sangat kental, sebagai modal utama mengantarkan Balikpapan sebagai masyarakat yang madani, yang memiliki masyarakat majemuk yang hidup rukun, harmonis, berperadaban modern, maju serta mamiliki nilai-nilai moralitas spiritual, agama dan kepercayaan masing-masing. Balikpapan, terakomodir secara profesional dalam program Pemerintah Kota Balikpapan, yakni : *clean, green and healthy* (bersih, hijau dan sehat).

2. Visi dan Misi Kota Balikpapan

a. Visi

Terwujudnya Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju (Madinatul Iman).

b. Misi

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, sehat jasmani dan memiliki daya saing dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Meujudkan tersedianya infrastruktur kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi kota di masa depan.
- 3) Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan.
- 4) Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi kota di masa depan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- 6) Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Kondisi dan Potensi Wilayah

a. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Letak geografis dan batas administrasi wilayah Kota Balikpapan terletak di Propinsi Kalimantan Timur, berada di antara $1^{\circ}-1,5^{\circ}$ lintang Selatan dan $116,30^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Balikpapan 503,3 Km atau 0,24% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Batas wilayah Kota Balikpapan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Selat Makasar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Paser Utara.

Secara administrasi wilayah Kota Balikpapan terbagi 5 kecamatan yang meliputi 27 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kota Balikpapan dalam lingkup eksternal Kalimantan Timur mempunyai fungsi dan peranan yang cukup besar berkaitan dengan letak, kedudukan dan potensi yang dimiliki yaitu sebagai pusat pengembangan wilayah selatan dan sebagai pintu gerbang wilayah Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pusat pengembangan industri pengilangan perminyakan untuk wilayah Kalimantan dan kawasan Indonesia Bagian Timur, sebagai pusat embarkasi haji ke V di Indonesia, tempat kedudukan markas Kodam VI Mulawarman wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebagai kota MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition) ke 10 di Indonesia, sebagai pusat kegiatan beberapa BUMN dan swasta wilayah Kalimantan dan serta sebagai kota industri, perdagangan dan jasa.

Kondisi topografi Kota Balikpapan \pm 85% dari luas wilayah merupakan daerah yang bebukit-bukit dan hanya \pm 15% merupakan daerah datar diantara daerah perbukitan dan berada pada daerah pantai, pusat perkotaan dan padat penduduk (*built up area*) yang berada pada ketinggian sekitar 0-100 meter diatas permukaan laut.

b. Potensi Wilayah

Secara umum kondisi topografi Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Wilayah Kota Balikpapan memiliki luas \pm 503,31 km², yang 85 % terdiri dari daerah perbukitan dengan kemiringan 15 – 40 % dan 15

% lainnya merupakan daerah datar yang terletak diantara daerah perbukitan yang membentang sepanjang Kota Balikpapan.

2) Luas daerah perkotaan yang berpenduduk padat (Built up area) merupakan daerah datar dan perbukitan, yang luasannya meliputi $\pm 102,3, \text{ km}^2$ atau 20,41 % dari luas wilayah Kota Balikpapan.

3) Bentuk wilayah di bagian selatan kota pada umumnya agak landai, kecuali di sekitar Teluk Balikpapan terdapat kelerengan yang cukup curam. Sebagai akibat dari kelerengan tersebut di Kota Balikpapan terdapat beberapa area kritis.

4) Daerah pesisir pantai Kota Balikpapan umumnya merupakan wilayah yang cukup datar, dengan kemiringan berkisar antara 0 – 15 %, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai wilayah kegiatan perkotaan, baik industri, perdagangan, jasa maupun pemukiman penduduk.

5) Berdasarkan elevasinya wilayah Kota Balikpapan berada pada ketinggian sekitar 0 – 100 m diatas permukaan laut.

B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan

1. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan

a. DPRD mempunyai fungsi

1) Legislasi

Diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama walikota.

2) Anggaran

Diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama walikota.

3) Pengawasan

Diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

b. Tugas dan Wewenang

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama walikota
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh walikota
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi dprd provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi dprd kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- 5) Memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil walikota
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional daerah

- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh sekelompok orang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka terdapat pembagian tugas yang terstruktur dalam organisasi guna tercapainya tujuan bersama. Alat kelengkapan dalam suatu instansi sangat diperlukan untuk mengkoordinasi dan diharapkan dapat memperlancar kegiatan dari satu bagian unit kerja ke unit kerja yang lain agar lebih efisien.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dipimpin oleh Pimpinan yang didukung oleh bagian-

bagian lainnya dalam instansi tersebut. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab pimpinan serta bagian lainnya sebagai berikut:

a. Pimpinan

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- 1) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
- 2) Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua
- 3) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari kelengkapan DPRD
- 4) Menjadi juru bicara DPRD
- 5) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
- 6) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
- 7) Mengadakan konsultasi dengan walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
- 8) Mewakili DPRD di pengadilan
- 9) Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 10) Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna
- 11) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

b. Badan Musyawarah

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan musyawarah terdiri dari atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunaaan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, badan anggaran, dan fraksi.

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan-peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya
- 2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

- 3) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
- 4) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
- 5) Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
- 6) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

c. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Komisi mempunyai tugas:

- 1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- 4) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD

- 5) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- 7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
- 8) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- 9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- 10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Komisi DPRD terdiri dari:

- a. Komisi I meliputi bidang Hukum dan Pemerintah
 - b. Komisi II meliputi bidang Perekonomian dan Keuangan
 - c. Komisi III meliputi bidang Pembangunan
 - d. Komisi IV meliputi bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD
- 2) Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah
- 3) Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program program prioritas yang telah ditetapkan
- 4) Melakukan pengaharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD
- 5) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam progra, legislasi daerah
- 6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap [embahas materi muatan rancangan pertauran daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
- 7) Memberikan msukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan olh Badan Musyawarah
- 8) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

e. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD
- 2) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 4) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur
- 5) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota

- 6) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam menyusun anggaran DPRD.

f. Badan Kehormatan

Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Badan kehormatan mempunyai tugas:

- 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat
- 4) Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus/panitia kerja yang bersifat tidak tetap.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah 43 kuesioner yang berasal dari jawaban responden pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan. Hasil penyebaran kuesioner, dari 45 kuesioner yang disebar, 43 kuesioner telah kembali dalam keadaan baik dan lengkap terisi sehingga layak digunakan dalam penelitian dan 2 buah kuesioner yang tidak terisi.

Analisis data yang dilakukan dalam bab ini pada dasarnya terdiri atas dua bagian, bagian pertama merupakan analisis deskriptif terhadap masing-masing variabel penelitian, sedangkan bagian kedua merupakan analisis data yang bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis. Selain analisis tersebut, dalam bab ini juga dilakukan deskripsi responden dan pengujian validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan yang digunakan.

A. Deskripsi Data Responden

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui karakteristik responden, analisis karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Hasil analisis karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	33	76,7
	Wanita	10	23,3
	Total	43	100
Usia	21-35 tahun	14	32,5
	36-45 tahun	12	27,9
	>45 tahun	17	39,5
	Total	43	100
Pendidikan Terakhir	SLTA/ sederajat	13	30,2
	D1	1	2,3
	D2	1	2,3
	D3	1	2,3
	D4		
	S1	19	44,2
	S2	8	18,6
	S3		
	Lainnya		
Total	43	100	

Sumber: Data diolah

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 33 orang atau 76,7 %, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 10 orang atau 23,3 %.

Analisis persentase berdasarkan usia diperoleh hasil bahwa mayoritas responden memiliki usia lebih dari 45 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau 39,5 % , responden yang memiliki usia 21 sampai dengan 35 tahun sebanyak 14 orang atau 32,5 %, dan responden yang memiliki usia 36 sampai dengan 45 tahun sebanyak 12 orang atau 27,9 %.

Hasil analisis persentase pada karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir diketahui bahwa mayoritas responden berpendidikan

terakhir adalah Strata satu (S1) sebanyak 19 orang atau 44,2 %, responden yang berpendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 13 orang atau 30,2%, selanjutnya responden yang berpendidikan Strata dua (S2) sebanyak 8 orang atau 18,6%, dan yang paling rendah adalah responden dengan pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 1 orang atau 2,3 %, sebanyak 1 Diploma 2 (D2) sebanyak 1 orang atau 2,3 % dan Diploma 1 (D1) sebanyak 1 orang atau 2,3 %.

B. Analisis Data

1. Pengujian Instrumen

Sebagai alat pengumpul data, kuesioner pada penelitian ini diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006).

Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom $(df) = n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator dapat dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel/No. Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Partisipasi Dewan Tentang Anggaran (X1)			
X1.1	0,597	0,3008	Valid
X1.2	0,577	0,3008	Valid
X1.3	0,585	0,3008	Valid
X1.4	0,588	0,3008	Valid
Akuntabilitas (X2)			
X2.1	0,434	0,3008	Valid
X2.2	0,416	0,3008	Valid
X2.3	0,416	0,3008	Valid
X2.4	0,663	0,3008	Valid
X2.5	0,391	0,3008	Valid
X2.6	0,403	0,3008	Valid
X2.7	0,313	0,3008	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)			
X3.1	0,591	0,3008	Valid
X3.2	0,535	0,3008	Valid
X3.3	0,480	0,3008	Valid
X3.4	0,512	0,3008	Valid
X3.5	0,464	0,3008	Valid
X3.6	0,470	0,3008	Valid
X3.7	0,574	0,3008	Valid
X3.8	0,682	0,3008	Valid
X3.9	0,731	0,3008	Valid
Transparansi Kebijakan Publik (X4)			
X4.1	0,418	0,3008	Valid
X4.2	0,538	0,3008	Valid
X4.3	0,489	0,3008	Valid
X4.4	0,563	0,3008	Valid
X4.5	0,332	0,3008	Valid
X4.6	0,386	0,3008	Valid
X4.7	0,354	0,3008	Valid

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Validitas (Lanjutan)

Pengawasan Keuangan Daerah (Y)			
Y.1	0,836	0,3008	Valid
Y.2	0,464	0,3008	Valid
Y.3	0,766	0,3008	Valid
Y.4	0,633	0,3008	Valid
Y.5	0,868	0,3008	Valid
Y.6	0,560	0,3008	Valid
Y.7	0,785	0,3008	Valid
Y.8	0,616	0,3008	Valid
Y.9	0,717	0,3008	Valid
Y.10	0,756	0,3008	Valid
Y.11	0,884	0,3008	Valid
Y.12	0,583	0,3008	Valid

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 5.1 di atas dapat diketahui besarnya koefisien korelasi di atas dari seluruh butir pertanyaan variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan Y memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,3008), maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas pada prinsipnya apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden benar-benar dapat diandalkan sebagai alat pengukur. Semakin tinggi tingkat keandalan suatu alat ukur, semakin stabil dan dapat diandalkan alat ukur tersebut dalam mengukur suatu gejala. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Nunally, 1967 dalam Ghozali, 2006: 42). Ringkasan hasil uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koef. <i>Cronbach Alpha</i>	Limit koef. <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X1)	0,777	0,6	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,722	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,840	0,6	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik (X4)	0,728	0,6	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	0,926	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian reliabilitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dalam kuesioner memiliki Cronbach Alpha $> 0,60$. Dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik dinyatakan reliabel.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji Normalitas, Multikolinearitas dan Heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data. Dalam statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan analisis statistik.

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada α sebesar 5 %. Jika nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Model	Variabel	Signifikansi
Pertama	PDTA	0,146
	PKD	0,332
Kedua	ZPDTA	0,146
	ZAKT	0,229
	AbsPDTA_AKT	0,104
Ketiga	PKD	0,332
	ZPDTA	0,146
	ZPM	0,328
	AbsPDTA_PM	0,433
Keempat	PKD	0,332
	ZPDTA	0,146
	ZTKP	0,160
	AbsPDTA_TKP	0,091
	PKD	0,332

Sumber: Data diolah

Data di atas merupakan hasil uji normalitas model pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan data normal, dengan melihat signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). Suatu model dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai

$Tolerance > 0,10$ atau sama dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 .

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	Tolerance	VIF
Kedua	ZPDTA	0,886	1,128
	ZAKT	0,745	1,343
	AbsPDTA_AKT	0,809	1,236
Ketiga	ZPDTA	0,736	1,359
	ZPM	0,834	1,200
	AbsPDTA_PM	0,806	1,240
Keempat	ZPDTA	0,877	1,141
	ZTKP	0,763	1,310
	AbsPDTA_TKP	0,819	1,222

Sumber: Data Diolah

Data di atas merupakan hasil uji multikolinearitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model kedua, ketiga dan keempat tidak mengandung multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* variabel independen $> 0,10$ atau nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) variabel independen < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006: 105).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan cara mengabsolutkan nilai residual (pengganggu) yang akan

menghasilkan sebuah nilai dan meregresikan nilai tersebut sebagai variabel dependen. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat tingkat signifikansinya, apabila tingkat signifikansi berada diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Variabel	Signifikansi
Kedua	ZPDTA	0,396
	ZAKT	0,861
	AbsPDTA_AKT	0,310
Ketiga	ZPDTA	0,381
	ZPM	0,370
	AbsPDTA_PM	0,389
Keempat	ZPDTA	0,329
	ZTKP	0,853
	AbsPDTA_TKP	0,305

Sumber: Data Diolah

Data di atas merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen AbsRes1 pada model pertama, AbsRes2 pada model kedua, AbsRes3 pada model keempat. Hal ini terlihat dari signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisis regresi. Maka selanjutnya melakukan analisis terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dalam dua tahap yaitu dengan melakukan regresi sederhana dan regresi berganda dengan model uji nilai selisih mutlak untuk .menguji pengaruh variabel moderasi.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana.

1) Koefisien Determinasi R^2

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Pertama

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	.407	.393	.41977

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,393, artinya bahwa variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 39,3%, sedangkan

sisanya 60,7% (100% - 39,3%) dijelaskan oleh faktor yang lain di luar model ini.

2) Menentukan hipotesis

$H_{01}: \beta_1=0$, pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

3) Menentukan *level of significance* (α)

Tingkat signifikansi α 5%, derajat kebebasan $df = n - (k+1) = 43 - (1+1) = 41$, diperoleh t_{tabel} sebesar 2,019.

4) Menentukan kriteria penerimaan

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 tidak ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

5) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel independen

Pengetahuan dewan tentang anggaran : $t_{hitung} = 5,307$, $t_{tabel} = 2,019$

6) Mengambil keputusan

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,423	.524		2,716	.010
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.679	.128	.638	5,307	.000

Sumber: Data Diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah:

$$PKD = 1,423 + 0,679PDTA$$

Tanda pada koefisien pada model regresi tersebut diatas adalah positif. Maksudnya adalah secara teoritis pengaruh dari variabel pengetahuan dewan tentang anggaran searah dengan peningkatan pengawasan keuangan daerah. Jadi, apabila pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah juga meningkat.

Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah 0,679 (tanda positif). Koefisien ini signifikan pada α 5% karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar (5,307>2,019) atau nilai probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama dapat diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak untuk menguji pengaruh moderasi.

1) Koefisien Determinasi R^2

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Kedua

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
2	.750 ^a	.562	.528	.36993

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,528, artinya bahwa variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, sebesar 52,8%, sedangkan sisanya 47,2% (100% - 52,8%) dijelaskan oleh faktor yang lain di luar model ini.

2) Menentukan hipotesis

$H_{02}: \beta_3=0$, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

$H_{a2}: \beta_3 \neq 0$, akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

3) Menentukan *level of significance* (α)

Tingkat signifikansi α 5%, derajat kebebasan $df = n - (k + 1) = 43 - (3 + 1) = 39$, diperoleh t tabel sebesar 2,022.

4) Menentukan kriteria penerimaan

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 tidak ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

5) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel independen

AbsPDTA_AKT: $t_{hitung} = 2,461$; $t_{tabel} = 2,022$

6) Mengambil keputusan

Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
2	(Constant)	4.015	.089		45.350	.000
	ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.295	.061	.548	4.864	.000
	ZAkuntabilitas	.234	.066	.434	3.537	.001
	AbsPDTA_AKT	.200	.081	.290	2.461	.018

Sumber: Data Diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah:

$$PKD = 4,015 + 0,295PDTA + 0,234AKT + 0,200[PDTA - AKT]$$

Tanda pada koefisien diatas adalah positif. Maksudnya adalah secara teoritis akuntabilitas berpengaruh searah terhadap peningkatan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jadi, apabila diperkuat dengan akuntabilitas maka hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat.

Koefisien regresi untuk variabel AbsPDTA_AKT adalah 0,200 (tanda positif). Koefisien ini signifikan pada α 5% karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar (2,461>2,022) atau nilai probabilitas signifikansi 0,018<0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel moderasi akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap

pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua dapat diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak untuk menguji pengaruh moderasi.

1) Koefisien Determinasi R^2

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Ketiga

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
3	.817 ^a	.667	.641	.32267

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,523 artinya bahwa variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 64,1%, sedangkan sisanya 35,9% (100% - 64,1%) dijelaskan oleh faktor yang lain di luar model ini.

2) Menentukan hipotesis

H_{03} : $\beta_5=0$, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

H_{a3} : $\beta_5 \neq 0$, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

3) Menentukan *level of significance* (α)

Tingkat signifikansi α 5%, derajat kebebasan $df = n - (k + 1) = 43 - (3 + 1) = 39$, diperoleh t tabel sebesar 2,022.

4) Menentukan kriteria penerimaan

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 tidak ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

5) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel independen

AbsPDTA_PM: $t_{hitung} = 2,493$; $t_{tabel} = 2,022$

6) Mengambil keputusan

Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
3	(Constant)	4.016	.083		48.457	.000
	ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.292	.058	.542	5.026	.000
	ZPartisipasi Masyarakat	.283	.055	.525	5.185	.000
	AbsPDTA_PM	.197	.079	.257	2.493	.017

Sumber: Data Diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah:

$$PKD = 4,016 + 0,292PDTA + 0,283PM + 0,197 [PDTA - PM]$$

Tanda pada koefisien diatas adalah positif. Maksudnya adalah secara teoritis partisipasi masyarakat berpengaruh searah terhadap

peningkatan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jadi, apabila diperkuat dengan partisipasi masyarakat maka hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat.

Koefisien regresi untuk variabel AbsPDTA_PM adalah 0,197 (tanda positif). Koefisien ini signifikan pada α 5% karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar (2,493>2,022) atau nilai probabilitas signifikansi $0,017 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel moderasi partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis ketiga dapat diterima.

d) Pengujian Hipotesis Keempat

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak untuk menguji pengaruh moderasi.

1) Koefisien Determinasi R^2

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Keempat

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
4	.772 ^a	.596	.565	.35536

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,565, artinya bahwa variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 56,5%, sedangkan sisanya 43,5% (100% - 56,5%) dijelaskan oleh faktor yang lain di luar model ini.

2) Menentukan hipotesis

H_{04} : $\beta_7=0$, transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

H_{a4} : $\beta_7 \neq 0$, transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

3) Menentukan *level of significance* (α)

Tingkat signifikansi α 5%, derajat kebebasan $df = n - (k+1) = 43 - (3+1) = 39$, diperoleh t tabel sebesar 2,022.

4) Menentukan kriteria penerimaan

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 tidak ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

5) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel independen

AbsPDTA_TKP: $t_{hitung} = 2,783$; $t_{tabel} = 2,022$

6) Mengambil keputusan

Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
4	(Constant)	3.984	.089		44.526	.000
	ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.296	.059	.549	5.052	.000
	ZTransparansi Kebijakan Publik	.253	.063	.470	4.037	.000
	AbsPDTA_TKP	.228	.082	.313	2.783	.008

Sumber: Data Diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah:

$$PKD = 3,984 + 0,296PDTA + 0,253TKP + 0,228 [PDTA - TKP]$$

Tanda pada koefisien diatas adalah positif. Maksudnya adalah secara teoritis transparansi kebijakan publik berpengaruh searah terhadap peningkatan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jadi, apabila diperkuat dengan tansparansi kebijakan publik, maka hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat.

Koefisien regresi untuk variabel AbsPDTA_AKT adalah 0,228 (tanda positif). Koefisien ini signifikan pada α 5% karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar ($2,783 > 2,022$) atau nilai probabilitas

signifikansi $0,008 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel moderasi transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis keempat dapat diterima.

C. Hasil Penelitian dan Interpretasi

Berdasarkan hasil uraian data yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah disimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengujian pada hipotesis keempat yang menguji pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah..

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh, bahwa secara parsial pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat kemampuan anggota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sopanah, 2002; Werimon, 2005; Rosseptalia, 2006 dan Coryanata 2007. Berdasarkan penelitian Yudono (2002) bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, karena dengan begitu diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Berdasarkan

hasil penelitian dari Sopanah (2003), diperoleh kesimpulan bahwa kualitas anggota dewan yang dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah.

Sekarang ini banyak sekelompok orang yang menginginkan jabatan sebagai anggota dewan, karena jabatan tersebut dipandang memiliki kualitas di mata masyarakat dan sebagai cara untuk mencari kesenangan pribadi. Akan tetapi, para anggota dewan tidak memperhatikan kualitas pendidikan dan pengalaman yang harusnya ada pada diri mereka, karena dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan yang memiliki pengetahuan yang baik dan memadai mengenai anggaran akan meningkatkan cara anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (semakin baik), sehingga dapat menciptakan keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh, bahwa akuntabilitas sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan, jika terjadi kondisi dimana akuntabilitas semakin baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat, jika akuntabilitas semakin rendah atau

kurang baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosseptalia (2006) Coryatna (2007) dan Pramita dan Indriyani (2010). Pemerintahan yang akuntabel dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Dengan adanya kondisi akuntabilitas yang baik yang diselenggarakan oleh pihak eksekutif secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, pengawasan keuangan daerah akan meningkat karena publik juga ikut mengawasi atau menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai seberapa jauh pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh, bahwa partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan, jika terjadi kondisi dimana partisipasi masyarakat semakin baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat, jika partisipasi masyarakat semakin rendah atau kurang baik maka pengaruh

pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sopanah (2003) yang menyimpulkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan dewan.

Penguatan fungsi pengawasan selain dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD, partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung juga berperan aktif dalam proses peningkatan pengawasan terhadap keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan informasi berupa aspirasi dan menyampaikan saran dan pendapatnya secara bertanggungjawab. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan pengawasan saja, namun dilakukan sejak dewan melakukan kegiatan penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka dewan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dapat mulai menyerap keinginan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah dan merealisasikannya dalam APBD. Sehingga pada saat kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga saat pengawasan APBD, masyarakat dapat benar-benar berpartisipasi dengan baik yang nantinya juga akan meningkatkan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah.

4. Pengaruh Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh, bahwa transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan, jika terjadi kondisi dimana transparansi kebijakan publik semakin baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin baik, akan tetapi apabila transparansi kebijakan publik semakin rendah atau kurang baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Roseptalia (2006) dan Coryanata (2007). Publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat kepada pihak eksekutif dan seberapa jauh mereka taat kepada peraturan yang berlaku. Pemberian informasi kepada publik secara jujur dan terbuka dapat meningkatkan keberhasilan dalam peningkatan otonomi daerah di Kota Balikpapan.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini disampaikan kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian. Kesimpulan dan saran yang disampaikan ini pada dasarnya merupakan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di kota Balikpapan. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan menyadari bahwa pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin baik dan memadai pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, maka cara anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin baik.
2. Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan Uji Nilai Selisih Mutlak yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

signifikan akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jika terjadi kondisi dimana akuntabilitas semakin baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat, tetapi apabila akuntabilitas semakin rendah atau kurang baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.

3. Pengujian ketiga dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan Uji Nilai Selisih Mutlak yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat. Jika terjadi kondisi dimana partisipasi masyarakat semakin baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat, akan tetapi apabila partisipasi masyarakat semakin rendah atau kurang baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.
4. Pengujian keempat dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan Uji Nilai Selisih Mutlak yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

(APBD). Jika terjadi kondisi dimana transparansi kebijakan publik semakin baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat, akan tetapi apabila transparansi kebijakan publik semakin rendah atau kurang baik maka pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan sampel yang relatif kecil yaitu sebanyak 43 sampel (anggota dewan dan terbatas pada wilayah Kota Balikpapan sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk lingkup wilayah yang berbeda.
2. Nilai *Adjusted R square* pada setiap model memiliki nilai yang tidak cukup besar, sehingga variabel independen yang ada di penelitian ini belum cukup menjelaskan variabel dependennya.
3. Variabel yang memoderasi pengaruh pengetahuan anggota dewan untuk mengawasi keuangan daerah pada penelitian ini hanya sebatas dalam lingkup pilar utama yang mendukung *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi .

C. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan sampel dalam lingkup provinsi atau beberapa kota sehingga sampel yang digunakan relatif lebih banyak dan hasil penelitian dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang lebih luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mempertimbangkan beberapa variabel independen yang bisa lebih menjelaskan variabel dependennya.
3. Bagi peneliti selanjutnya mungkin perlu juga mempertimbangkan pada komitmen politik, keterampilan dan latar belakang pendidikan anggota dewan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain yang sekiranya dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, Isma. 2007. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi X*. Hal 1-24.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Indeks
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Bestari Dwi. 2009. "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang". *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 1, No. 1: 31-40.
- Indriantoro dan Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*.
<http://www.goodgovernance.co.id>. Diakses tanggal 11 Juli 2012
- Mahsun, Muhammad, Firma Sulistiyowati, dan Heribetus A. Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Pramita dan Andriyani. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Hal 1-37.
- Renyowijoyo, Mulindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia, 1998. *Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

- _____, 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*.
- _____, 2001. *Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- _____, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- _____, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____, 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- _____, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah*.
- _____, 2006. *Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*.
- Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sopannah. 2003. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Hal 1160-1173.
- Utomo, Hari. 2011. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali dan Mohamad Nazir. 2007. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Hal 1-33.



LAMPIRAN

Lampiran I

Kuesioner

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

DAFTAR PERTANYAAN

IDENTITAS RESPONDEN :

Berikan tanda silang (×) pada jawaban yang Saudara anggap sesuai:

Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita

Usia :
a. 21 - 35 tahun
b. 36 - 45 tahun
c. > 46 tahun

Pendidikan Terakhir :
 SLTA/Sederajat DI D2 D3 D4
 S1 S2 S3 -Lainnya.....

Petunjuk Pengisian :

Berikan tanda silang (×) pada kolom alternatif jawaban yang telah tersedia, untuk jawaban yang paling tepat menurut persepsi Anda.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

N : Netral (Skor 3)

S : Setuju (Skor 4)

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN

PETUNJUK: Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai hal-hal terkait pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i tentang anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah. Pengetahuan tentang anggaran dimaksudkan untuk menjalankan fungsi dewan dalam mengawasi keuangan daerah (APBD).

No.	PERTANYAAN	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1.	Saya memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD					
2.	Saya memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh eksekutif					
3.	Saya memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD					
4.	Saya memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan dan kegagalan dalam pelaksanaan APBD.					

AKUNTABILITAS

PETUNJUK : Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i selaku anggota dewan legislatif tentang akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah.

No.	PERTANYAAN	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1.	Renstrada dan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD					
2.	Akuntabilitas merupakan pelaporan pertanggungjawaban masalah keuangan, hasil, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan disajikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat					

3.	Anggota dewan perlu mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP yang disusun oleh pemerintah daerah					
4.	Indikator kinerja telah digunakan untuk mengevaluasi APBD					
5.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD di awasi secara kontinue					
6.	Penyajian APBD harus menyertakan informasi masa masa lalu (sebelumnya)					
7.	Dalam mengevaluasi APBD, memperbandingkan anggaran dengan realisasinya					

PARTISIPASI MASYARAKAT

PETUNJUK : Pernyataan Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan lembaga eksekutif dalam menyusun arah dan kebijakan keuangan daerah (APBD).

No.	PERTANYAAN	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1.	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat					
2.	Prioritas dan rencana APBD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat.					
3.	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran					
4.	Bagi saya partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD					
5.	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, selalu melibatkan masyarakat.					

6.	Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD					
7.	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD.					
8.	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.					
9.	Selama ini antara dewan dengan masyarakat terjadi komunikasi yang sinergis					

TRANSPARANSI PUBLIK

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terkait transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif terkait penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi anggaran.

No.	PERTANYAAN	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1.	Selama ini pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusunnya					
2.	Bagi saya, tidak ada kesulitan untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, karena tidak terlalu birokratis					
3.	Selama ini pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.					
4.	Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik.					
5.	Selama ini dokumen-dokumen yang					

	berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses atau diperoleh masyarakat.					
6.	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat					
7.	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi dan pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i selaku dewan legislatif dalam menjalankan fungsi legislatifnya yaitu pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD)

No.	PERTANYAAN	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1.	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
2.	Analisis politik saya lakukan dalam proses penyusunan APBD					
3.	Saya terlibat dalam pengesahan APBD					
4.	Saya merasa pengesahan APBD telah memenuhi asas transparansi					
5.	Saya memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disahkan.					
6.	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh eksekutif.					
7.	Evaluasi yang saya lakukan mencakup alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi Anggaran.					
8.	Saya meminta keterangan berkaitan					

	dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota					
9.	Anggota Dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD					
10.	Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD, bukan hanya disebabkan karena ketidakcermatan dalam menghitung nota anggaran					
11.	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD					
12.	Saya aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Walikota/Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.					

Daftar Jawaban Responden

Tabel 1. Jawaban Mengenai Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X_1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Rata-rata
1	4	5	4	4	4,25
2	5	5	4	4	4,50
3	5	5	4	4	4,50
4	4	3	4	4	3,75
5	4	4	3	4	3,75
6	4	4	3	3	3,50
7	4	4	4	4	4,00
8	3	3	2	2	2,50
9	4	4	4	4	4,00
10	3	3	3	2	2,75
11	4	4	4	5	4,25
12	4	4	3	5	4,00
13	5	5	4	4	4,50
14	5	4	3	3	3,75
15	4	4	4	4	4,00
16	4	5	4	4	4,25
17	4	4	4	5	4,25
18	5	4	3	3	3,75
19	4	4	4	4	4,00
20	4	4	4	4	4,00
21	4	4	4	3	3,75
22	4	4	3	4	3,75
23	4	4	4	4	4,00
24	5	5	3	3	4,00
25	4	4	4	4	4,00
26	5	5	5	5	5,00
27	5	5	4	4	4,50
28	5	4	4	4	4,25
29	5	4	4	4	4,25
30	4	4	4	4	4,00
31	5	5	5	5	5,00
32	5	4	5	5	4,75
33	5	5	4	5	4,75
34	4	4	4	3	3,75
35	4	4	4	3	3,75
36	5	5	4	4	4,50
37	5	5	5	5	5,00
38	4	4	4	4	4,00
39	4	3	4	4	3,75
40	5	5	4	4	4,50
41	5	5	3	3	4,00
42	4	3	4	3	3,50
43	4	4	3	4	3,75

Tabel 2. Jawaban Mengenai Akuntabilitas (X₂)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Rata-rata
1	4	5	5	4	4	3	3	4,00
2	4	4	3	3	4	3	4	3,57
3	4	4	4	5	4	4	4	4,14
4	5	4	4	4	4	3	4	4,00
5	5	3	4	4	4	4	4	4,00
6	5	3	3	3	4	4	5	3,86
7	4	4	5	3	3	3	4	3,71
8	4	3	4	4	4	4	4	3,86
9	4	5	4	4	4	4	4	4,14
10	4	4	4	4	3	3	4	3,71
11	3	3	3	2	2	3	2	2,57
12	4	4	4	3	3	3	4	3,57
13	4	4	5	3	3	3	5	3,86
14	5	5	5	4	3	3	4	4,14
15	4	5	4	4	4	4	4	4,14
16	4	5	5	4	4	4	4	4,29
17	4	4	5	4	3	3	4	3,86
18	5	4	4	3	4	3	4	3,86
19	4	4	4	4	5	4	4	4,14
20	4	4	4	5	4	5	4	4,29
21	5	4	4	3	3	3	3	3,57
22	4	4	4	5	4	3	4	4,00
23	4	5	5	5	2	3	4	4,00
24	5	5	5	5	5	5	4	4,86
25	4	4	4	4	3	3	4	3,71
26	5	5	5	5	4	4	4	4,57
27	5	4	4	5	4	4	5	4,43
28	5	5	4	4	4	3	4	4,14
29	5	5	4	4	3	3	5	4,14
30	4	3	3	3	4	3	4	3,43
31	5	5	5	5	4	4	5	4,71
32	5	5	5	5	5	4	5	4,86
33	5	5	5	5	5	5	4	4,86
34	5	5	4	5	3	3	5	4,29
35	5	5	4	5	3	3	5	4,29
36	4	4	4	3	3	3	5	3,71
37	5	5	5	4	3	3	4	4,14
38	4	5	4	4	4	3	4	4,00
39	4	3	4	4	4	4	4	3,86
40	4	4	4	5	4	3	4	4,00
41	5	4	4	4	4	3	4	4,00
42	5	3	4	4	4	4	4	4,00
43	5	3	3	3	4	4	5	3,86

Tabel 3. Jawaban Mengenai Partisipasi Masyarakat (X_3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Rata-rata
1	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4,33
2	4	3	4	3	4	4	3	3	5	3,67
3	4	3	3	4	5	3	4	4	4	3,78
4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4,22
5	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3,44
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
7	5	4	4	4	4	4	2	4	4	3,89
8	4	5	4	3	4	4	3	5	4	4,00
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
10	3	3	4	5	4	4	4	4	4	3,89
11	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3,67
12	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4,11
13	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4,11
14	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4,56
15	4	5	4	4	3	3	5	5	4	4,11
16	5	4	5	3	5	4	5	5	5	4,56
17	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,11
18	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4,44
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
20	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3,78
21	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3,22
22	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3,78
23	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4,00
24	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4,78
25	3	2	3	3	2	4	3	3	3	2,89
26	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,89
27	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4,89
28	5	4	3	4	5	5	5	5	4	4,44
29	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3,78
30	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,78
31	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4,89
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
33	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4,67
34	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4,67
35	5	4	5	5	5	3	5	5	4	4,56
36	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4,00
37	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4,78
38	4	5	4	4	3	3	5	5	4	4,11
39	5	3	3	3	5	4	5	5	5	4,22
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
42	5	5	4	4	2	4	2	5	4	3,89
43	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3,78

Tabel 4. Jawaban Mengenai Transparansi Publik (X₄)

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	Rata-rata
1	4	3	4	3	4	3	3	3,43
2	4	4	3	3	4	3	4	3,57
3	4	4	4	5	4	4	4	4,14
4	5	4	4	4	4	3	4	4,00
5	5	3	4	4	4	4	4	4,00
6	5	3	3	3	4	4	5	3,86
7	4	4	5	3	4	3	4	3,86
8	4	3	4	4	4	4	4	3,86
9	4	5	4	4	4	4	4	4,14
10	4	4	4	4	4	3	4	3,86
11	3	3	3	3	3	3	2	2,86
12	4	4	4	4	4	3	4	3,86
13	4	4	5	3	4	3	5	4,00
14	5	5	5	4	4	3	4	4,29
15	4	5	4	4	4	4	4	4,14
16	4	5	5	4	4	4	4	4,29
17	4	4	5	4	4	3	4	4,00
18	5	4	4	3	4	3	4	3,86
19	4	4	4	4	5	4	4	4,14
20	4	4	4	5	4	5	4	4,29
21	5	4	4	3	3	3	3	3,57
22	4	4	4	5	4	3	4	4,00
23	4	5	5	5	3	3	4	4,14
24	5	5	5	5	4	5	4	4,71
25	4	4	4	4	3	3	4	3,71
26	5	5	5	5	4	4	4	4,57
27	5	4	4	5	4	4	5	4,43
28	5	5	4	4	4	4	4	4,29
29	4	4	4	4	3	3	5	3,86
30	4	3	3	3	4	3	4	3,43
31	5	5	5	5	4	4	5	4,71
32	5	5	5	5	5	4	5	4,86
33	5	5	5	5	5	5	4	4,86
34	5	5	4	5	3	3	5	4,29
35	5	5	4	5	4	3	5	4,43
36	4	4	4	3	4	3	5	3,86
37	5	5	5	4	4	3	4	4,29
38	4	5	4	4	4	3	4	4,00
39	4	3	4	4	4	4	4	3,86
40	4	4	4	5	4	3	4	4,00
41	5	4	4	4	3	3	4	3,86
42	5	3	4	4	4	4	4	4,00
43	5	4	3	3	4	4	5	4,00

Tabel 5. Jawaban Mengenai Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Rata-rata
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,92
2	3	5	4	2	4	4	4	3	4	5	4	4	3,83
3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4,42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
5	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3,42
6	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,83
7	4	5	4	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3,67
8	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2,92
9	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	4	3	4,00
10	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3,67
11	5	4	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	4,58
12	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3,58
13	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4,58
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
15	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4,25
16	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4,42
17	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4,33
18	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3,75
19	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,83
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
21	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3,67
22	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3,58
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,92
24	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,75
25	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3,75
26	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4,92
27	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4,92
28	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4,83
29	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	4,67
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,92
31	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	4,67
32	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4,92
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
34	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4,75
35	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4,83
36	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4,50
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4,83
38	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4,25
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,92
40	3	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4,00
41	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	3	4,25
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
43	3	2	4	3	3	4	2	3	4	4	2	2	3,00

Lampiran II
Hasil Output SPSS

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	43	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.777	.783	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	11.91	2.658	.597	.524	.720
X1.2	12.05	2.522	.577	.521	.725
X1.3	12.44	2.538	.585	.448	.722
X1.4	12.37	2.192	.588	.458	.728

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	43	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.722	.718	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	23.74	6.719	.434	.291	.691
X2.2	23.98	6.166	.416	.514	.695
X2.3	24.00	6.524	.416	.454	.693
X2.4	24.16	5.187	.663	.481	.620
X2.5	24.49	6.351	.391	.482	.700
X2.6	24.70	6.549	.403	.509	.696
X2.7	24.05	6.903	.313	.249	.716

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	43	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.840	.846	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	32.81	14.155	.591	.473	.820
X3.2	33.05	13.855	.535	.514	.826
X3.3	33.12	14.819	.480	.292	.831
X3.4	33.21	14.169	.512	.336	.828
X3.5	32.98	14.214	.464	.393	.834
X3.6	33.12	14.534	.470	.319	.832
X3.7	33.16	13.378	.574	.497	.822
X3.8	32.91	13.515	.682	.641	.810
X3.9	32.95	14.093	.731	.617	.810

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	43	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.728	.724	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	23.93	5.924	.418	.245	.702
X4.2	24.19	5.060	.538	.458	.671
X4.3	24.19	5.536	.489	.400	.685
X4.4	24.30	4.883	.563	.421	.663
X4.5	24.44	6.300	.332	.294	.719
X4.6	24.84	5.759	.386	.385	.709
X4.7	24.21	5.931	.354	.233	.716

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	43	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.926	.933	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	46.00	34.476	.836	.830	.914
Y.2	45.95	36.807	.464	.553	.930
Y.3	45.84	37.092	.766	.703	.920
Y.4	46.12	34.248	.633	.616	.924
Y.5	45.95	34.760	.868	.824	.914
Y.6	46.09	37.277	.560	.436	.925
Y.7	46.00	34.857	.785	.706	.916
Y.8	46.09	35.229	.616	.472	.924
Y.9	45.86	36.218	.717	.729	.920
Y.10	45.81	35.488	.756	.801	.918
Y.11	45.93	33.162	.884	.827	.911
Y.12	46.40	34.911	.583	.414	.926

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengatahuan Dewan Tentang Anggaran	Pengawasan Keuangan Daerah
N		43	43
Normal Parameters ^a	Mean	4.0640	4.1826
	Std. Deviation	.50619	.53868
Most Extreme Differences	Absolute	.175	.144
	Positive	.155	.144
	Negative	-.175	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		1.144	.946
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146	.332
a. Test distribution is Normal.			

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	ZAkuntabilitas	AbsPDTA_AKT	Pengawasan Keuangan Daerah
N		43	43	43	43
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000	.0000000	.8397	4.1826
	Std. Deviation	1.0000000	1.0000000	.78122	.53868
Most Extreme Differences	Absolute	.175	.159	.185	.144
	Positive	.155	.159	.185	.144
	Negative	-.175	-.133	-.160	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		1.144	1.040	1.215	.946
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146	.229	.104	.332
a. Test distribution is Normal.					

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	ZPartisipasi Masyarakat	AbsPDTA_PM	Pengawasan Keuangan Daerah
N		43	43	43	43
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000	.0000000	.8421	4.1826
	Std. Deviation	1.0000000	1.0000000	.70004	.53868
Most Extreme Differences	Absolute	.175	.145	.133	.144
	Positive	.155	.145	.133	.144
	Negative	-.175	-.110	-.133	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		1.144	.950	.872	.946
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146	.328	.433	.332
a. Test distribution is Normal.					

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	ZTransparansi Kebijakan Publik	AbsPDTA_TKP	Pengawasan Keuangan Daerah
N		43	43	43	43
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000	.0000000	.8698	4.1826
	Std. Deviation	1.0000000	1.0000000	.74028	.53868
Most Extreme Differences	Absolute	.175	.171	.189	.144
	Positive	.155	.134	.189	.144
	Negative	-.175	-.171	-.132	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		1.144	1.123	1.242	.946
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146	.160	.091	.332
a. Test distribution is Normal.					

Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
2 (Constant)	.225	.058		3.910	.000
ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.034	.040	-.151	-.858	.396
ZAkuntabilitas	-.007	.037	-.029	-.176	.861
AbsPDTA_AKT	.057	.055	.176	1.030	.310

a. Dependent Variable: AbsRes1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
3 (Constant)	.208	.049		4.219	.000
ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.031	.035	-.160	-.886	.381
ZPartisipasi Masyarakat	.029	.032	.154	.908	.370
AbsPDTA_PM	.041	.047	.150	.870	.389

a. Dependent Variable: AbsRes2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
4 (Constant)	.227	.052		4.373	.000
ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.034	.034	-.163	-.988	.329
ZTransparansi Publik	.007	.036	.033	.187	.853
AbsPDTA_TKP	.049	.048	.178	1.039	.305

a. Dependent Variable: AbsRes3

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	.407	.393	.41977

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.963	1	4.963	28.164	.000 ^a
	Residual	7.225	41	.176		
	Total	12.187	42			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.423	.524		2.716	.010
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.679	.128	.638	5.307	.000

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Regression

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
2	AbsPDTA_AKT, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran, ZAkuntabilitas ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
2	.750 ^a	.562	.528	.36993

a. Predictors: (Constant), AbsPDTA_AKT, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran, ZAkuntabilitas

ANOVA^d

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
2	Regression	6.850	3	2.283	16.686	.000 ^a
	Residual	5.337	39	.137		
	Total	12.187	42			

a. Predictors: (Constant), AbsPDTA_AKT, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran, ZAkuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
2	(Constant)	4.015	.089		45.350	.000		
	ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.295	.061	.548	4.864	.000	.886	1.128
	ZAkuntabilitas	.234	.066	.434	3.537	.001	.745	1.343
	AbsPDTA_AKT	.200	.081	.290	2.461	.018	.809	1.236

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
3	AbsPDTA_PM, ZPartisipasi Masyarakat, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
3	.817 ^a	.667	.641	.32267

a. Predictors: (Constant), AbsPDTA_PM, ZPartisipasi Masyarakat, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
3	Regression	8.127	3	2.709	26.018	.000 ^a
	Residual	4.061	39	.104		
	Total	12.187	42			

a. Predictors: (Constant), AbsPDTA_PM, ZPartisipasi Masyarakat, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
3	(Constant)	4.016	.083		48.457	.000		
	ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.292	.058	.542	5.026	.000	.736	1.359
	ZPartisipasi Masyarakat	.283	.055	.525	5.185	.000	.834	1.200
	AbsPDTA_PM	.197	.079	.257	2.493	.017	.806	1.240

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
4	AbsPDTA_TKP, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran, ZTransparansi Kebijakan Publik ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
4	.772 ^a	.596	.565	.35536

a. Predictors: (Constant), AbsPDTA_TKP, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran, ZTransparansi Kebijakan Publik

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
4	Regression	7.262	3	2.421	19.169	.000 ^a
	Residual	4.925	39	.126		
	Total	12.187	42			

a. Predictors: (Constant), AbsPDTA_TKP, ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran, ZTransparansi Kebijakan Publik

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
4	(Constant)	3.984	.089		44.526	.000		
	ZPengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.296	.059	.549	5.052	.000	.877	1.141
	Ztransparansi Kebijakan Publik	.253	.063	.470	4.037	.000	.763	1.310
	AbsPDTA_TKP	.228	.082	.313	2.783	.008	.819	1.222

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

Balikpapan, 17 Januari 2012

Kepada Yth

Nomor : 170/01.44/Setwan/I/2012
Lamp. : --
Perihal : Ijin Penelitian.

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
di-

Yogyakarta

Menghubungi Surat Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodi Akt./966/XII/2011 Tanggal 16 Desember 2011 Perihal Ijin Penelitian dengan judul *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Keuangan daerah* pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan atas nama :

Nama : **Rezki Natalia Pagappong**
NIM : 082114005
Prodi : Akuntansi

Sehubungan hal tersebut kami tidak keberatan menerima Mahasiswi Saudara untuk melakukan penelitian di Kantor DPRD Kota Balikpapan.

Demikian untuk diketahui dan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

